

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena sosial di Kota Padang adalah banyaknya anak terlantar, keluarga miskin, bencana alam dan non alam, penyandang disabilitas, dan usaha kecil menengah yang tidak berkembang. Banyaknya penduduk miskin akan mendorong meningkatnya angka anak putus sekolah dan meningkatnya anak-anak terlantar. Pada umumnya anak-anak terlantar mengalami masalah ganda seperti kesulitan ekonomi, menderita gizi buruk, kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, tidak bisa mendapat layanan pendidikan secara maksimal, dan lain sebagainya. Sehingga menyebabkan anak tersebut bertindak seenaknya tanpa memikirkan perbuatannya. Pada saat ini sangat banyak anak jalanan yang menjadi anak *punk*, meminta – minta, memakai narkoba, tauran, sampai seks bebas . Fenomena tersebut perlu mendapat perhatian karena berdampak negatif seperti meresahkan dan mengganggu ketertiban, kenyamanan, serta keindahan kota.

Dalam UUD 1945, “anak terlantar itu dipelihara oleh negara” bermakna pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap pemeliharaan dan pembinaan anak-anak terlantar, termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya. Mereka perlu mendapatkan hak-haknya secara normal sebagaimana layaknya anak, yaitu hak sipil dan kemerdekaan (civil rights and freedoms), lingkungan keluarga dan pilihan pemeliharaan (family environment and alternative care), kesehatan dasar dan

kesejahteraan (basic health and welfare), pendidikan, rekreasi dan budaya (education, leisure and culture activities), dan perlindungan khusus (special protection).

Untuk mengurangi banyaknya kasus tersebut maka seluruh aspek kehidupan baik lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sampai dengan lingkungan pemerintah berperan penting. Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial Kota Padang dibantu dengan Satuan Polisi Pamongpraja berperan untuk menertibkan serta merehabilitasi anak terlantar. Salah satu program dari dinas sosial kota Padang adalah rehabilitasi dan memberikan pelatihan agar anak terlantar tersebut lebih mandiri dan hidup harmonis dengan masyarakat sekitarnya.

Dinas Sosial Kota Padang bertanggung jawab dalam merehabilitasi dan memberikan pelatihan kepada anak terlantar dan masyarakat kurang mampu. Tidak hanya itu Dinas Sosial juga mempunyai kegiatan seperti memberi bantuan kepada anak penyandang disabilitas, bantuan lanjut usia terlantar, bantuan fakir miskin, bantuan pasca bencana, bantuan kelompok usaha bersama (KUBE), dan kegiatan lainnya. Kegiatan tersebut tentu saja membutuhkan dana yang tidak sedikit dan beberapa kegiatannya tidak terduga kapan akan terjadi.

Sebelumnya Dinas Sosial Kota Padang telah mengalokasikan dana untuk kegiatan 1 tahun periode yang bersumber dari APBD dan juga mempunyai pengeluaran dana. Pengeluaran tersebut dilakukan untuk memenuhi segala kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas sosial kota Padang. Tetapi karena ada kegiatan yang tidak menentu kapan dan berapa kali terjadi ini akan menjadi permasalahan keuangan yang harus di perhitungkan contohnya bencana alam, tidak ada yang tahu kapan bencana alam akan terjadi maka dari itu bisa saja dalam 1 tahun kurang dari 10 kasus

bencana alam dan bisa saja lebih dari 10 kasus. Jika pada 1 tahun bencana alam sering terjadi dan banyak menimbulkan kerugian maka banyak sekali bantuan yang akan diberikan oleh Dinas Sosial, semua itu bisa saja menghabiskan setengah atau lebih dari yang dianggarkan.

Pada awalnya Dinas Sosial mendapatkan Uang Persediaan (UP) yang telah dianggarkan. Karena banyaknya kegiatan yang akan diselenggarakan maka Uang Persediaan (UP) tersebut tidak akan cukup untuk memenuhi kegiatan dalam 1 tahun periode, maka dari itu perlu diadakan Ganti Uang (GU) untuk mengganti uang yang telah terpakai oleh kegiatan sebelumnya dan bisa menunjang kegiatan yang akan dijalankan selanjutnya.

Dalam hal ini dibutuhkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang berisi permintaan pembayaran dari tiap bidang dalam suatu SKPD yang anggarannya telah ditetapkan dalam APBD. Maka berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara membuat Surat Permintaan Pembayaran-Ganti Uang (SPP-GU) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD. Hal tersebut dilakukan sebagai pengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan serta telah diverifikasi dan disahkan pertanggung jawabannya. Sehingga jumlah uang persediaan relatif sama setiap bulannya sampai batas anggaran maksimal yang telah ditetapkan.

Sistem pengeluaran kas daerah Dinas Sosial Kota Padang menggunakan subsistem Ganti Uang (GU) meliputi:

- 1) Penerbitan Surat Penyediaan dana (SPD)
- 2) Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

- 3) Penerbitan Surat permintaan Membayar (SPM)
- 4) Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- 5) Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran
- 6) Pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Pengeluaran Pembantu

Tidak terlepas dari itu pastilah dalam Dinas Sosial Kota Padang memiliki sistem dan prosedur ganti uang persediaan pada SKPD tersebut, maka penulis berminat untuk menyusun laporan tugas akhir dengan judul “PROSEDUR PENGAJUAN SPP-GU (GANTI UANG) PADA DINAS SOSIAL KOTA PADANG”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut terdapat rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan magang, yaitu:

1. Bagaimanakah prosedur pengajuan SPP – GU (Ganti Uang) pada Dinas Sosial Kota Padang?
2. Apakah kendala saat mengajukan SPP – GU pada Dinas Sosial Kota Padang?

1.3. Tujuan

Magang merupakan mata kuliah wajib yang diikuti oleh seluruh mahasiswa/I Program Studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dengan beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam laporan magang yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui prosedur pengajuan spp-gu (ganti uang) pada Dinas Sosial Kota Padang.
2. Mengetahui kendala saat mengajukan SPP – GU Dinas Sosial Kota Padang.

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat 3 (tiga) manfaat yang akan dibahas dalam laporan magang, yaitu :

1. Bagi Dinas Sosial
 - a. Sebagai salah satu referensi Dinas Sosial Kota Padang untuk pengajuan SPP-GU (Ganti Uang) .
2. Bagi Mahasiswa
 - a. Merupakan salah satu syarat kelulusan Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
 - b. Untuk mempraktekkan ilmu teori yang didapat di perkuliahan ke lapangan (Instansi Pemerintah).
 - c. Meningkatkan pengetahuan dalam dunia kerja.
 - d. Terbiasa bersosialisasi dengan masyarakat di lingkungan kerja.
3. Bagi Masyarakat
 - a. Mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kota Padang yang sebenarnya dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. Mengetahui bagaimana keuangan Dinas Sosial Kota Padang khususnya tentang ganti uang (GU)
 - c. Mengetahui kendala saat mengajukan SPP – GU Dinas Sosial Kota Padang
 - d. Mengetahui apakah kinerja pemerintah di bidang ini berjalan sesuai tahapan yang telah ditetapkan.

1.5 Kegiatan Magang

Kegiatan magang dilaksanakan selama 40 hari kerja yang dimulai pada tanggal 5 Juni 2017 s/d 4 Agustus 2017 (jam kerja menyesuaikan dengan ketentuan kantor Dinas Sosial Kota Padang). Kegiatan penulis selama magang yaitu :

1. Memeriksa kelengkapan dan mestempel laporan SPJ
2. Mengentri RKA ke SIPKD
3. Membuat SSE Pajak untuk kelengkapan SPJ
4. Mengantarkan laporan SPJ yang telah diperiksa kepada masing – masing satuan kerja
5. Mengantarkan SPJ ke Inspektorat untuk diperiksa
6. Membuat pajak daerah dan negar untuk kelengkapan SPJ
7. Merepak BKU
8. Merekap SPPD
9. Foto copy berkas-berkas
10. Menjemput SPJ yang telah diperiksa ke Inspektorat

Kegiatan terinci dapat dilihat pada lampiran.

1.6 Metode Penulisan

Dalam penyusunan laporan ini, penulis mengumpulkan data dengan metode sebagai berikut :

1. Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data yang diambil dari sumber-sumber lain seperti buku, Undang-undang ataupun Undang-Undang Dasar.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan suatu metode pengumpulan data lapangan dengan melakukan wawancara langsung kepada narasumber.

b. Studi Pustaka

Merupakan segala usaha yang dilakukan penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik yang akan atau yang sedang diteliti. Informasi diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan ilmiah, atau sumber lainnya baik media cetak maupun elektronik.

1.7 Sistematika Penulisan Laporan

Agar penulisan laporan lebih detail dan dapat dimengerti, berikut beberapa penjelasan sistematika penulisan laporan yang penulis lakukan :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan masalah, kegiatan magang, manfaat magang, metode penulisan, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II Kerangka Teori

Bab ini merupakan kerangka pemikiran yang terdiri dari penjelasan prosedur, penjelasan tentang penatausahaan pengelolaan keuangan daerah, penjelasan sistem dan prosedur akuntansi pemerintah.

BAB III Gambaran Umum Dinas Sosial

Gambaran umum tentang Dinas Sosial Kota Padang yang terdiri dari visi dan misinya, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi masing-masing kepala bidang pada Dinas Sosial Kota Padang.

BAB IV Pembahasan

Menguraikan tentang prosedur pengajuan SPP-GU (Ganti Uang) pada Dinas Sosial

Kota Padang

BAB V Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan dari keseluruhan kajian dan dilengkapi dengan saran-saran yang sifatnya membangun, yang berguna untuk masyarakat dan para pembaca laporan ini serta berisikan beberapa saran.

